

**TINJAUAN KONDISI MAKRO EKONOMI
KABUPATEN PANDEGLANG**

2018



TINJAUAN KONDISI MAKROEKONOMI KABUPATEN PANDEGLANG 2018

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21,0 cm

Jumlah Halaman : xii + 102 Halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Pandeglang

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Pandeglang

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

BUPATI PANDEGLANG



HJ. IRNA NARULITA, SE, MM

WAKIL BUPATI PANDEGLANG



TANTO WARSONO ARBAN,SE,ME

SAMBUTAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK
KABUPATEN PANDEGLANG

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka "*Tinjauan Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Pandeglang Tahun 2018*" ini dapat disusun dan diterbitkan yang merupakan hasil kerjasama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang.

Publikasi buku ini berisi analisis terhadap data atau indikator statistik ekonomi, dimana keberadaannya diharapkan dapat menjadi referensi baik kemanfaatan data maupun indikator ekonomi yang dibutuhkan bagi pelaku dan pengamat serta analisis ekonomi. Dan publikasi ini bisa sebagai acuan dalam hal data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Kami menyadari publikasi buku ini masih jauh dari sempurna segala saran dan masukan kami harapkan untuk perbaikan publikasi sejenis pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Pandeglang, November 2018

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI
DAN STATISTIK
KABUPATEN PANDEGLANG

YAHYA GUNAWAN KASBIN, S. Sos
NIP. 19671127 198801 1 001

DAFTAR ISI

Katalog.....	i
Sambutan.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Grafik.....	xii
I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Sasaran.....	6
1.4. Manfaat.....	6
1.5. Ruang Lingkup.....	6
1.6. Lokasi Kegiatan.....	6
1.7. Sumber Pendapatan.....	6
1.8. Sistematika Penulisan.....	7
II. Konsep dan Definisi.....	9
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	11
2.1.1. Definisi PDRB.....	11
2.1.2. Pendekatan Penghitungan.....	11
2.1.3. Metode Penghitungan.....	14

2.2.	Pendapatan Per Kapita.....	57
2.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	58
2.4.	Struktur Perekonomian.....	58
III.	Tinjauan Perekonomian Kabupaten Pandeglang.....	61
3.1.	Gambaran Umum.....	63
3.2.	Perkembangan Perekonomian Pandeglang Tahun 2017.....	64
3.2.1.	PDRB.....	64
3.2.2.	PDRB Per Kapita.....	66
3.2.3.	Pertumbuhan Ekonomi.....	67
3.2.4.	Struktur Perekonomian.....	69
3.2.4.1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	71
3.2.4.2.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.....	72
3.2.4.3.	Pertambangan dan Penggalian.....	73
3.3.	Perbandingan Antar Wilayah.....	74
3.4.	Kuangan Pemerintah Daerah.....	76
3.4.1.	Pendapatan Kabupaten Pandeglang.....	78
3.4.2.	Belanja Pemerintah Kabupaten Pandeglang.....	80
3.5.	Peran Intermediasi Perbankan.....	83
IV	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	89

4.1	Kesimpulan.....	91
4.2	Rekomendasi.....	93
	Lampiran.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Pandeglang 2015-2017.....	66
Tabel 2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2017 dan Andilnya Menurut Kategorinya (persen).....	68
Tabel 3.	Distribusi Ekonomi Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2017 Menurut Kategori (persen).....	69
Tabel 4.	Perbandingan Agregat PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten 2017.....	74
Tabel 5.	Perkembangan dan Realisasi APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2017 (juta rupiah).....	77
Tabel 6.	Realisasi Pendapatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2017 (juta rupiah).....	78
Tabel 7.	Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Pandeglang 2016-2017 (juta rupiah).....	81
Tabel 8.	Nilai Simpanan dan Pinjaman Masyarakat Kabupaten Pandeglang pada Bank Umum dan BPR Tahun 2015-2017 (juta rupiah).....	83
Tabel 9.	Nilai Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah yang Disalurkan Pada Bank Umum dan BPR Tahun 2015-2017 (juta rupiah).....	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan PDRB adhb Pandeglang dan Sharenya Terhadap Propinsi Tahun 2010-2017.....	65
Grafik 2.	PDRB adhb Kabupaten /Kota Se-Propinsi Banten Tahun 2017.....	65
Grafik 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pandeglang, Banten dan Nasional.....	68
Grafik 4.	Distribusi PDRB Kabupaten Pandeglang Menurut Kelompok Tahun 2015-2017 (persen).....	70
Grafik 5.	Distribusi PDRB Kabupaten dan Kota Se-Propinsi Banten, 2017 (persen)	75
Grafik 6.	Distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang 2017 (persen).....	80
Grafik 7.	Distribusi Komponen Belanja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 (persen).....	82
Grafik 8.	Distribusi Komponen Simpanan Dan Kredit Yang Dihimpun Dan Disalurkan Bank Umum Dan BPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 (persen).....	84
Grafik 9.	Distribusi Penyaluran Kredit UMKM Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Tahun 2017 (Persen).....	87

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2018 adalah merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode tahun 2016-2021 adalah “ Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui transformasi harmoni agrobisnis, maritimbisnis dan wisatabisnis menuju rumah sehat dan keluarga sejahtera 2020”. Secara lebih rinci penjabaran visi tersebut adalah Terwujudnya Pandeglang Berkah merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan motto yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang adalah kabupaten yang bersih, elok, ramah, kuat, aman dan hidup atau disingkat BERKAH.

Maksud dari “Transformasi Harmoni” yang terdapat dalam visi adalah merupakan perubahan selaras, serasi dan seimbang pada sistem tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik dengan jalinan kebersamaan dan kedamaian. Sedangkan maksud dari “Menuju Rumah Sehat” yaitu menuju kondisi daerah Kabupaten Pandeglang yang kondusif, masyarakatnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses informasi, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan secara baik. Dan maksud “Menuju Keluarga Sejahtera”

yaitu menuju suatu keadaan dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang yang maju dan mandiri.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pandeglang, maka misi yang dilaksanakan adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
- b. Membangun konektivitas wilayah
- c. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian
- d. Meningkatkan nilai tambah sektor maritim
- e. Modernisasi pengelolaan potensi wisata
- f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat system inovasi daerah.

Berdasarkan keenam misi tersebut pada dasarnya adalah untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian, dimana nilai tambah tersebut muaranya adalah dapat dinikmati oleh penduduk pandeglang.

Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah diperlukan beberapa indikator untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Dari berbagai indikator yang ada, salah satu yang sangat dibutuhkan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB adalah indikator yang mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang ada di suatu daerah. Dengan adanya indikator ini diharapkan pengambil kebijakan

ekonomi di Pandeglang, akan mampu menentukan sasaran yang tepat terhadap hasil pembangunan yang akan dicapai. Dengan mempertimbangkan berbagai manfaat yang diperoleh dari publikasi ini, maka ketersediaan data indikator makroekonomi secara terus-menerus tiap tahunnya sangat diperlukan.

Disamping PDRB dalam publikasi ini juga disajikan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peran intermediasi perbankan dalam menunjang perekonomian daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Publikasi Tinjauan Kondisi Makroekonomi Kabupaten Pandeglang 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai keadaan perekonomian Kabupaten Pandeglang selama tahun 2017. Sedangkan tujuan penyusunan publikasi ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya nilai PDRB Kabupaten Pandeglang tahun 2015-2017 berikut seluruh indikator turunannya, diantaranya adalah PDRB perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian.
2. Mengetahui peran APBD dalam menunjang perekonomian Kabupaten Pandeglang.
3. Mengetahui peran intermediasi perbankan dalam menunjang perekonomian Kabupaten Pandeglang.
4. Menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan perencanaan program pembangunan.

1.3 Sasaran

Data PDRB Kabupaten Pandeglang tahun 2015-2017, data APBD, data perbankan serta data pendukung yang lain.

1.4. Manfaat

Manfaat hasil penyusunan Tinjauan Makroekonomi Kabupaten Pandeglang 2018 adalah sebagai bahan evaluasi program pembangunan selama tahun 2017 dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program pembangunan daerah ke depan.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis yang dibahas adalah meliputi data PDRB Kabupaten Pandeglang tahun 2015-2017 berikut indikator turunannya, yaitu PDRB Perkapita, angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE), dan struktur perekonomian. Selain itu juga **dibahas** peran APBD dan intermediasi perbankan.

1.6. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengumpulan data, penghitungan, dan analisis adalah di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.

1.7. Sumber Pendanaan

Penyusunan publikasi Tinjauan Kondisi Makroekonomi Kabupaten Pandeglang 2018 seluruhnya dibebankan pada

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2018.

1.8. Sistematika Penulisan

Publikasi Tinjauan Makroekonomi Kabupaten Pandeglang 2018 ini dibagi dalam 5 bab penulisan, yaitu

Bab 1 Pendahuluan, menerangkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, lokasi kegiatan, sumber pendanaan dan sistematika penulisan.

Bab 2 Konsep dan Definisi, berisi tentang penjelasan indikator yang dibahas dalam publikasi.

Bab 3 Tinjauan Ekonomi Pandeglang, berisi tentang gambaran umum dan perkembangan perekonomian Kabupaten Pandeglang selama tahun 2017.

Bab 4 Analisis Keuangan dan Perbankan, berisi analisis peran APBD dan intermediasi perbankan dalam menunjang perekonomian Kabupaten Pandeglang.

Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi tentang kesimpulan hasil analisis indikator makro ekonomi serta rekomendasi untuk meningkatkan kinerja perekonomian Kabupaten Pandeglang.

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

PDRB ○

Pendapatan Perkapita ○

Laju Pertumbuhan Ekonomi ○

Struktur Perekonomian ○

BAB 2

KONSEP DAN DEFINISI

2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.1. Definisi PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu.

2.1.2. Pendekatan Penghitungan

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (NTB) yang tercipta sebagai hasil proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.

$$PDRB_t = \sum_{i=1}^n NTB_{it}$$

dengan t = tahun ke- t dan;

i = sektor ke- i .

Untuk saat ini, PDRB yang telah disusun adalah untuk 17 (tujuh belas) kategori, yaitu:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Pengadaan Listrik dan Gas
- e. Pengadaan Air
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- j. Informasi dan Komunikasi
- k. Jasa Keuangan
- l. Real Estate
- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- o. Jasa Pendidikan
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q. Jasa lainnya

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor netto di suatu wilayah/region pada suatu periode (biasanya setahun). Yang dimaksud dengan ekspor netto adalah ekspor dikurangi impor.

$$\begin{aligned}
 PDRB_t = & [Konsumsi(Rumahtangga + Pemerintah \\
 & + Lembaga Non Profit)]_t \\
 & + [Pembentukan Modal Tetap Bruto]_t \\
 & + [Perubahan Stok]_t + ([Ekspor]_t - [Impor]_t)
 \end{aligned}$$

dengan t = tahun ke- t .

c. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah/region pada jangka waktu tertentu (biasanya setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Termasuk sebagai Komponen penyusun PDRB adalah penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

$$\begin{aligned}
 PDRB_t = & (Sewa Tanah)_t + (Deviden/Bunga)_t \\
 & + (Upah Gaji)_t + (Surplus Usaha)_t \\
 & + (Pajak Tak Langsung Netto)_t
 \end{aligned}$$

Nilai PDRB akan sama walaupun dihitung dengan menggunakan tiga cara berbeda seperti yang telah disebutkan di atas. PDRB Pandeglang dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi dan pengeluaran. Dari sisi pendekatan produksi (*production approach*), angka PDRB diperoleh dari hasil penghitungan total Nilai Produksi (kumulatif) seluruh sektor lapangan usaha perekonomian setelah dikurangi dengan Biaya

Antara (biaya yang habis dalam proses produksi) yang disebut dengan Nilai Tambah Bruto (NTB). Perbedaan hasil akhir disebabkan oleh adanya sumber data yang berbeda serta metode penghitungan yang berbeda. Untuk Publikasi ini PDRB yang digunakan adalah dengan pendekatan Produksi.

2.1.3. Metode Penghitungan

PDRB dihitung berdasarkan harga pada tahun berjalan yang disebut PDRB atas dasar harga berlaku dan harga pada tahun dasar 2010 yang disebut PDRB atas dasar harga konstan 2010.

1. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Langsung

Pada penghitungan metode langsung ini dilakukan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dari ketiga pendekatan tersebut akan memberikan hasil yang sama.

b. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, nilai tambah di suatu wilayah/*region* diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi nasional ke dalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional dengan menggunakan indikator yang mempunyai pengaruh paling erat dengan kegiatan ekonomi tersebut.

2. Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan 2010, yaitu:

a. Revaluasi

Metode ini dilakukan dengan cara menilai output (produksi) dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 2010. Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2010. Selanjutnya NTB atas dasar harga konstan, diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-

masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi misalnya tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap penghitungan output atas dasar harga konstan. Kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

c. Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga yang berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan sebagainya. Indeks harga di atas dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

d. Deflasi Berganda

Dalam **Deflasi Berganda** ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil **Deflasi** tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya. Sedangkan indeks harga untuk biaya antara

adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Kenyataannya sangat sulit melakukan **Deflasi** terhadap biaya antara. Di samping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, **Deflasi Berganda** ini belum banyak dipakai. Penghitungan komponen penggunaan PDRB atas dasar harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara di atas, tetapi mengingat data yang tersedia maka digunakan cara **Deflasi** dan **Ekstrapolasi**.

2.1.4. Uraian Kategori

2.1.4.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk **meme-nuhi** kebutuhan sendiri (**subsisten**) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.4.1.1. Tanaman Pangan

Kelompok ini meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dan sejenisnya), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel,

jawawut, jelai, gandum, dan sejenisnya). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup lapangan usaha pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

2.1.4.1.2. Tanaman Hortikultura

Kelompok tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman, sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

2.1.4.1.3. Tanaman Perkebunan

Kelompok Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan

(negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.

2.1.4.1.4. Peternakan

Kelompok Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Sublapangan usaha ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

2.1.4.1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kelompok jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan

yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicapuk juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penang-kapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

2.1.4.2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

Sublapangan usaha ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang

menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

2.1.4.3. Perikanan

Sublapangan usaha ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pem-benihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Metode Penghitungan Output dan Nilai Tambah

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan keter-sediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output **dibeda-kan** atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada lapangan usaha ini tidak hanya mencakup output utama **dan ikutan** pada saat **penen** tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources* (CBR).

Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress* (WIP). Sehingga total output pada lapangan usaha ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapannya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu sublapangan usaha diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (*intermediate consumption*).

Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.1.4.2. Pertambangan Dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat sub lapangan usaha, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.1.4.2.1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Sublapangan usaha Pertambangan Migas dan Panas Bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

2.1.4.2.2. Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara men-cakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencarian (*liquefaction*). Operasi pertambangan

tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, **penyarinagan** dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas **atau** memudahkan pengangkutan **dan** penyimpanan / penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan **Lignit** mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

2.1.4.2.2. Pertambangan Bijih Logam

Sublapangan usaha ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt **dan lain**. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia **lainya** mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi **dan** peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; **serta** pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

2.1.4.2.3. Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Sublapangan usaha ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam sublapangan usaha ini adalah komoditi garam hasil penggalian.

2.1.4.3. Industri Pengolahan

Lapangan usaha **Industri Pengolahan** meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian serta produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk lapangan usaha industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan makloon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.1.4.3.1. Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk turunan melalui cara teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009 : kode 19.

2.1.4.3.2. Industri Makanan dan Minuman

Industri Makanan dan Minuman merupakan gabungan dari dua golongan pokok, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009 : kode 10 dan 11.

2.1.4.3.3. Industri Pengolahan Tembakau

Pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 12.

2.1.4.3.4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Sublapangan usaha ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu **Industri Tekstil** dan **Industri Pakaian Jadi**. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti : spreng, taplak meja, gordena, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan : kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.1.4.3.5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Lapangan usaha ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Sublapangan usaha ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 15.

2.1.4.3.6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan **Barang Anyaman**

Sublapangan usaha ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk **kons-truksi** dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali **pengger-gajian**, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Sublapangan usaha ini tidak mencakup pembuatan **mebeler**, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contoh : pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu,

kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009 : kode 16.

2.1.4.3.7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Sublapangan usaha ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu **Industri Kertas** dan **Barang dari Kertas**, dan **Industri Percetakan** dan **Reproduksi Media Rekaman**. **Industri Kertas** dan **Barang dari Kertas** mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan **Pembuatan** dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama.

Industri **Pencetakan** dan **Reproduksi Media Rekaman** mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan **pen-dukung** yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan **Industri Pencetakan**; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode / cara untuk memindahkan suatu *image* dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui / dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009 : kode 17 dan 18.

2.1.4.3.8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu **Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional**. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri **Farmasi dan Obat Tradisional** mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009 : kode 20 dan 21.

2.1.4.3.9. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Sublapangan usaha ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009 : kode 22.

2.1.4.3.10. Industri Barang Galian Bukan Logam

Sublapangan usaha ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009 : kode 23.

2.1.4.3.11. Industri Logam Dasar

Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau **bungkahan** dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24.

2.1.4.3.12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang **Elektronik,Optik, dan Peralatan Listrik**

Golongan ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan,

mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009 : kode 25, 26 dan 27.

2.1.4.3.13. Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam golongan pokok **Industri Mesin dan Perlengkapan** adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya, yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009 : kode 28

2.1.4.3.13. Industri Alat Angkutan

Golongan pokok ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup **pem-buatan** berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009 : kode 29 dan 30.

2.1.4.3.14. Industri Furnitur

Industri **Furnitur** mencakup pembuatan **mebeller** dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan **mebeller** adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan **mebeller** cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009 : kode 31.

2.1.4.3.15. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan **Pema-sangan Mesin dan Peralatan**

Sublapangan usaha ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Sublapangan usaha ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Golongan pokok ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Sublapangan usaha ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk

pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009 : kode 32 dan 33.

2.1.4.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Lapangan usaha ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.1.4.4.1. Ketenagalistrikan

Sublapangan usaha ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan **penyaluran** tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

2.1.4.4.2. Pengadaan Gas dan Produksi Es

Golongan ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Golongan ini mencakup pembuatan gas dan pen-distribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk pembuatan es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

2.1.4.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk

limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat men-cemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk lapangan usaha ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

2.1.4.6. Konstruksi

Lapangan usaha Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain : Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase,

sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pember-sihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

2.1.4.7. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perda-gangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran

merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Lapangan usaha ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.1.4.7.1. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Sublapangan usaha ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.1.4.7.2. Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Sublapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub-lapangan usaha ini.

2.1.4.8. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak,

dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.1.4.8.1. Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

2.1.4.8.2. Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

2.1.4.8.3. Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang ber-operasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

2.1.4.8.4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

2.1.4.8.5. Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

2.1.4.8.4. Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan

penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

2.1.4.9. Penyediaan Akomodasi **Dan** Makan Minum

Lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam lapangan usaha ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.1.4.9.1. Penyediaan Akomodasi

Sublapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk **penye-diaan** akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan

minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

2.1.4.9.2. Penyediaan Makan

Kegiatan **sub lapangan** usaha ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional (konvensional), restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

2.1.4.10. Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau **mendistri-busikan** produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Lapangan usaha terdiri dari beberapa industri yaitu **Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.**

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik,

penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti **cd rom** buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian **me-nyiarikannya**, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal

atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhu-bungan dengan teknis komputer.

2.1.4.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan usaha ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Lapangan usaha ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.1.4.11.1. Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit/ pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/ pinjaman baik kredit jangka pendek/ menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Peran-tara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

2.1.4.11.2. Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk diguna-kan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas kejadian musibah / kecelakaan terhadap barang atau

orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak bertanggung dapat menerima biaya atas hancur/ rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak bertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu **Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.**

2.1.4.11.3. Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman.

Sublapangan usaha ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. **Pembiayaan konsumen men-cakup** usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. **Pembiayaan kartu kredit** mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. **Pembiayaan anjak piutang** mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

2.1.4.11.4. Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Sublapangan usaha ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang **menye-lenggarakan** dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Keegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan - perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

2.1.4.12. REAL ESTAT

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Lapangan usaha ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

2.1.4.13. JASA PERUSAHAAN

Lapangan usaha Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain : jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelenggaraan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Jasa Periklanan

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

2.1.4.14. ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Lapangan usaha ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-

undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan **social** wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di lapangan usaha lain dalam KBLI tidak termasuk pada lapangan usaha ini, meskipun dilakukan oleh **Badan** pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada lapangan usaha ini, tetapi **peng-ajaran** itu sendiri masuk kategori P (Pendidikan) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

2.1.4.15. JASA PENDIDIKAN

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai **peker-jaan**, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Lapangan usaha ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan **televise**, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan **pendidiakn** dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

2.1.4.16. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya,

dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup : Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

2.1.4.17. JASA LAINNYA

Lapangan usaha **Jasa Lainnya** merupakan gabungan empat **sub-lapangan** usaha pada KBLI 2009. Lapangan usaha ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa **Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga**; Jasa **Perorangan yang Melayani Rumah Tangga**; Kegiatan **Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri** untuk memenuhi kebutuhan; Jasa **Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional**, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** berkategori R di dalam KBLI 2009. Sublapangan usaha ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan **Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga** yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan **Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan** (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Lapangan usaha ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, **Badan Regional** dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World **Bank**, **The** World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain.

2.2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam kenyataannya penghitungan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Kabupaten Pandeglang sulit dilakukan karena masih belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar Kabupaten. Oleh karena itu sampai saat ini penyajian data pendapatan masih menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian angka PDRB ini merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Dengan kata lain PDRB merupakan gambaran *product originated*. Sebagai *proxy* dari pendapatan perkapita, PDRB perkapita didapat dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) didapat dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke- n terhadap nilai pada tahun ke- $(n-1)$, dibagi dengan nilai pada tahun ke- $(n-1)$, kemudian dikalikan dengan 100 persen. LPE menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu terhadap waktu sebelumnya. Dalam penghitungan LPE digunakan PDRB atas dasar harga konstan agar dapat menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang sesungguhnya (riil) sebagai akibat proses produksi tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga (inflasi) yang terjadi. LPE selama ini dijadikan alat ukur kinerja pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah.

2.4. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB. Dari struktur tersebut dapat diketahui apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder maupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan.

Sektor sekunder adalah sektor yang sudah tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya alam lagi, tetapi lebih banyak menggunakan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia, sektor ini terdiri dari lapangan usaha Industri

Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian sektor tersier adalah sektor yang bisa dikatakan sudah tidak mengandalkan sumber daya alam lagi, sektor ini terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN PANDEGLANG

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PANDEGLANG

3.1. Gambaran umum

Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten yang terletak di ujung Barat Pulau Jawa. Secara geografis terletak antara 621'-710' Lintang Selatan dan 104 48'-106 11' Bujur Timur, memiliki luas wilayah 2.747 Km (274.689,92 ha), atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan panjang garis pantai 230 Km. Topografi daerah Kabupaten Pandeglang sebagian besar adalah dataran rendah yang berada di daerah Tengah dan Selatan yang memiliki luas 85,07% dari luas keseluruhan Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan iklimnya dipengaruhi oleh angin Monson dan gelombang La Nina. Bila saat musim penghujan tiba (November s.d Maret) cuaca didominasi oleh angin barat (dari Samudra Hindia sebelah Selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan musim kemarau (Juni s.d Agustus) cuaca didominasi oleh angin timur yang menyebabkan Kabupaten Pandeglang mengalami kekeringan terutama di wilayah bagian utara terlebih lagi bila berlangsung El-Nino.

Penggunaan lahan didominasi oleh lahan kehutanan, persawahan dan perkebunan besar. Pada tahun 2015 luas kehutanan sebesar 63.717,59 hektar (23,19% luas Kabupaten

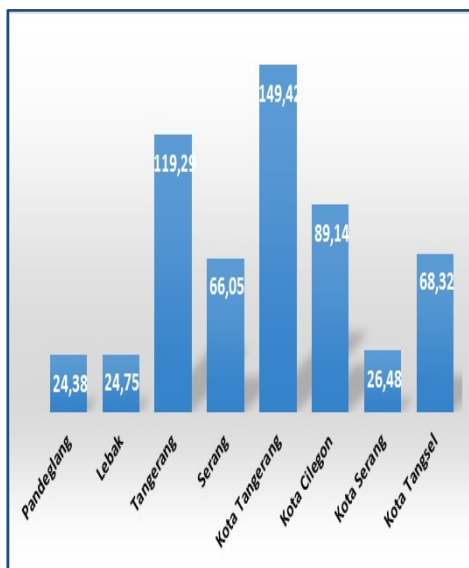
Pandeglang) terdiri dari 42,42% luas hutan rakyat dan 57,58% luas hutan Negara. Sedangkan luas persawahan sebesar 54.745,63 hektar (19,93% dari luas Kabupaten Pandeglang) terdiri dari 40,29% luas persawahan irigasi dan 59,71% luas persawahan non irigasi. Sementara itu luas perkebunannya sebesar 13.789,43 hektar atau 5,02% dari luas Kabupaten Pandeglang. Dengan memperhatikan luas lahan persawahan dan perkebunan yang begitu luas tak heran jika Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang merupakan sentra pertanian di Provinsi Banten. Tidak hanya sebagai sentra tanaman pangan tetapi juga terkenal dengan hortikulturanya. Sehingga Pandeglang menjadi target atau sasaran di Provinsi Banten untuk melaksanakan dan mensukseskan program Pemerintah Nasional yaitu **Upsus Pajalele**.

3.2 Perkembangan Perekonomian Pandeglang Tahun 2017

3.2.1 PDRB

Aktivitas kegiatan perekonomian di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 24,38 triliun rupiah meningkat sebesar 9,87 persen. Hal ini berarti seluruh kapasitas produksi /nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari ketujuh belas lapangan usaha mengalami peningkatan. Dimana lapangan usaha yang menghasilkan nilai tambah terbesar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,53 triliun rupiah, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; **reparasi** mobil dan motor sebesar

2,77 triliun rupiah dan lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 2,30 triliun rupiah.



Grafik 1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) Pandeglang dan Sharenya Terhadap Propinsi Tahun 2010-2017

Grafik 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) Kabupaten /Kota Se-Propinsi Banten Tahun 2017

Selama periode 2010-2017 secara nominal PDRB Pandeglang terus mengalami peningkatan. Namun jika diperhatikan **sharenya** terhadap propinsi perkembangannya terus mengalami penurunan (2010-2015) dan mulai tahun 2016 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2017 sebesar 4,32 persen. Hal ini pertanda baik karena menunjukkan bahwa kapasitas produksi/nilai tambah yang dihasilkan mulai bergerak naik dibandingkan kab/kota yang lain, meskipun kapasitas produksi/nilai tambah yang dihasilkan lapangan usaha dari ketujuhbelas kategori di **pandeglang** tersebut masih menduduki peringkat terakhir se-Propinsi Banten.

3.2.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah. Lebih tepatnya PDRB per kapita digunakan sebagai proxy untuk pendapatan per kapita, hal ini dikarenakan ketiadaan informasi mengenai total pendapatan atas faktor produksi yang masuk dan keluar Kabupaten Pandeglang. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Disisi lain besar kecilnya PDRB tergantung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel 1. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Pandeglang 2015-2017

Uraian	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB adh.berlaku (juta rupiah)	20.347.502,53	22.186.719,33	24.376.074,58
PDRB adh.konstan (juta rupiah)	15.974.129,39	16.856.468,51	17.876.027,09
Penduduk Pertengahan Tahun (orang)	1.194.911	1.200.512	1.205.203
PDRB per kapita adh.berlaku (rupiah)	17.028.467,00	18.481.047,53	20.225.700,22
PDRB per kapita adh.konstan (rupiah)	13.368.467,93	14.041.066,24	14.832.378,52
Pertumbuhan PDRB per kapita adh.berlaku (%)	11,17	8,53	9,44
Pertumbuhan PDRB per kapita adh.konstan (%)	5,23	5,03	5,64

*angka perbaikan, **angka sementara

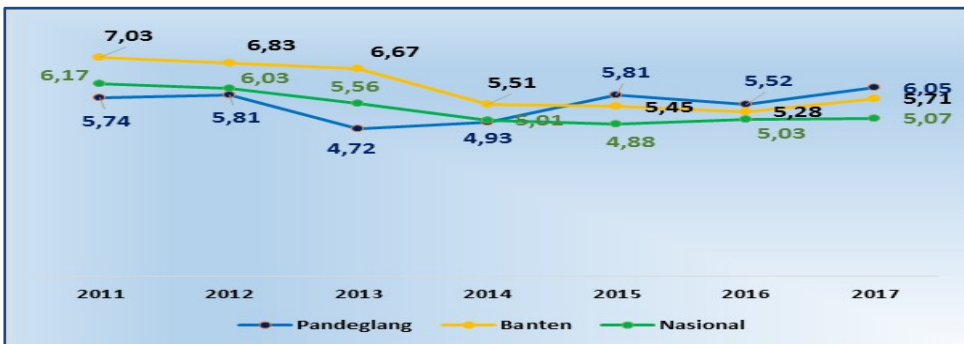
Sumber: BPS Kab Pandeglang

Nilai PDRB per kapita **pandeglang** atas dasar harga berlaku **tahun 2017 sebesar 18,46** juta rupiah setahun yang berarti bahwa rata-rata setiap penduduk mendapatkan nilai tambah sebesar 20,22 juta rupiah setahun, mengalami kenaikan sebesar 9,44 persen tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2016. Sementara itu bila dihitung berdasarkan harga konstan atau biasa disebut sebagai PDRB per kapita riil, secara riil rata-rata setiap penduduk memperoleh bagian sebesar 14,83 juta rupiah setahun atau setiap bulannya setiap penduduk memperoleh bagian sekitar 1,23 juta rupiah. Namun dalam konteks kehidupan nyata sosial ekonomi distribusi pendapatan tidaklah terbagi merata seperti ini.

3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 tumbuh sebesar 6,05 persen. Artinya pada tahun 2017 total nilai tambah riil (tidak dipengaruhi perubahan harga) yang tercipta dari hasil produksi barang dan jasa di Kabupaten Pandeglang sebesar 6,05 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan capaian yang tertinggi selama 2011-2016, dan mencapai angka 6 persen dimana di tahun-tahun sebelumnya berada pada kisaran 4 dan 5 persen. Pertumbuhan ekonomi pandeglang pada tahun 2017 ini juga berada di atas pertumbuhan Banten dan Nasional dimana hanya tumbuh masing-masing sebesar 5,71 persen dan 5,07 persen. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha pertanian, dimana pertumbuhannya mengalami percepatan dan memberikan andil terhadap total pertumbuhan sebesar 2,44 persen.

Grafik 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pandeglang, Banten dan Nasional



Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2017 dan Andilnya Menurut Kategorinya (persen)

Uraian	LPE		Andil
	2016	2017	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,43	7,69	2,44
Pertambangan dan Penggalian	3,34	(2,53)	(0,23)
Industri Pengolahan	1,96	7,74	0,49
Pengadaan Listrik dan Gas	20,73	1,07	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,22	5,97	0,00
Konstruksi	6,00	9,76	0,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	5,71	0,72
Transportasi dan Pergudangan	5,78	6,03	0,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,23	8,84	0,47
Informasi dan Komunikasi	3,99	8,87	0,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,84	5,05	0,14
Real Estate	5,85	5,94	0,50
Jasa Perusahaan	4,67	5,87	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,09	3,23	0,18
Jasa Pendidikan	7,50	7,63	0,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,50	6,85	0,07
Jasa lainnya	7,88	7,93	0,08

Sumber: BPS Kab Pandeglang

3.2.4. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diukur dari seberapa besar peran masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai yang tercipta disuatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Dari struktur ekonomi suatu daerah dapat diketahui apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder atau tersier.

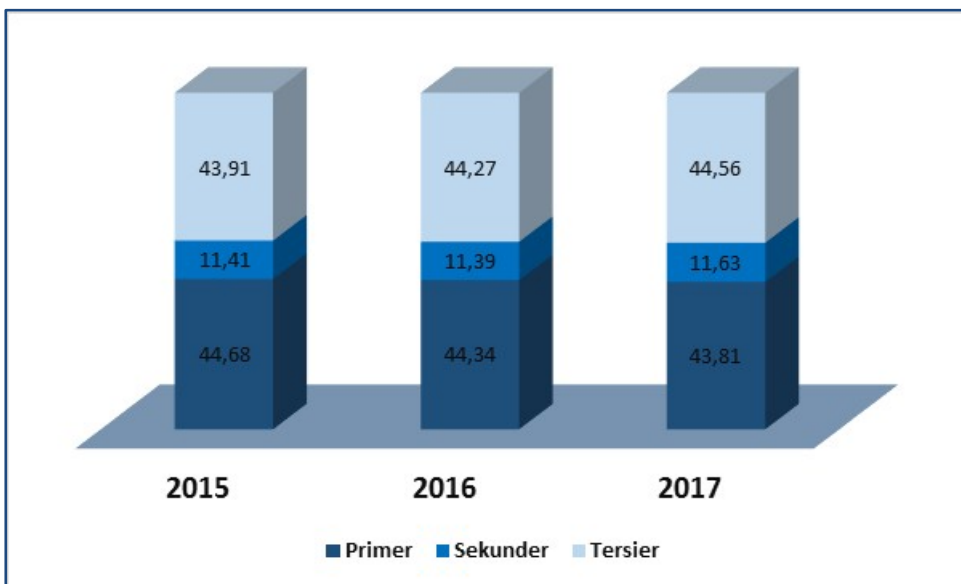
Tabel 3. Distribusi Ekonomi Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2017 Menurut Kategori (persen)

Uraian	Distribusi/Share		Range	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,98	34,36	1	1
Pertambangan dan Penggalian	10,37	9,45	3	3
Primer	44,34	43,81		
Industri Pengolahan	5,76	5,79	6	6
Pengadaan Listrik dan Gas	0,60	0,61	14	14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	17	17
Konstruksi	4,97	5,17	9	9
Sekunder	11,39	11,63		
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,35	11,40	2	2
Transportasi dan Pergudangan	5,72	5,72	7	7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,29	5,34	8	8
Informasi dan Komunikasi	0,30	0,31	15	15
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	2,57	11	11
Real Estate	7,04	7,15	4	4
Jasa Perusahaan	0,22	0,23	16	16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,33	6,23	5	5
Jasa Pendidikan	3,44	3,41	10	10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,96	13	13
Jasa lainnya	1,07	1,09	12	12
Tersier	44,27	44,42		
Total	100,00	100,00		

Sumber: BPS Kab. Pandeglang

Pada tahun 2017 struktur ekonomi Kabupaten Pandeglang masih didominasi oleh tiga lapangan usaha terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (34,36 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor (11,40 persen) dan Pertambangan dan penggalian (9,45 persen). Sedangkan lapangan usaha yang berkontribusi kecil yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,06 persen); Jasa Perusahaan (0,23 persen); dan Informasi dan Komunikasi (0,31 persen).

Grafik 4. Distribusi PDRB Kabupaten Pandeglang Menurut Kelompok Tahun 2015-2017 (persen)



Selama tahun 2014-2016 struktur perekonomian di Pandeglang masih didominasi oleh sektor primer, namun pada tahun 2017 peranan sektor primer berkurang beralih ke sektor sekunder dan tersier. Kontribusi sektor primer pada tahun 2017

sebesar 43,81 persen, sekunder 11,63 persen dan tersier 44,56 persen.

Jika diamati pergerakannya selama tiga tahun ini 2015-2017 besaran persentase sektor sekunder dan sektor primer berfluktuatif, sementara itu sektor tersier terus bergerak naik. Kondisi tersebut merupakan pertanda baik karena diharapkan kedepannya memang sektor tersier cukup dominan, mengingat sektor ini dibangun dari lapangan usaha yang tidak tergantung pada sumber daya alam. Namun demikian, akan lebih baik jika ada keterkaitan antar sektor, dimana perekonomian pandeglang yang ditopang oleh sektor primer dapat bekerjasama dengan sektor lainnya dalam arti kata masing-masing sektor tidak berdiri sendiri, sehingga bukan tidak mungkin **jika** nantinya perekonomian pandeglang akan tercipta perekonomian yang kuat, dengan sektor primer yang stabil dan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan.

3.2.4.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan **Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** adalah lapangan usaha yang memiliki kontribusi/share besar terhadap PDRB Pandeglang. Pada tahun 2017 kontribusi lapangan usaha tersebut sebesar 34,36 persen meningkat dibandingkan dengan **tahun 2016 yang sebesar 33,98 persen**. Namun perkembangan kinerjanya mengalami perlambatan dimana pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,43 persen, sedangkan tahun 2015 mampu tumbuh mencapai 7,70 persen. Kinerja sektor pertanian pada tahun 2017 sangat menggembirakan, dilihat dari laju

pertumbuhan ekonominya, sektor ini mampu tumbuh 7,69 persen. Tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,43 persen. Kenaikan produksi tanaman pangan memberikan andil yang besar terhadap sektor ini. Hal ini didukung program - program pemerintah khususnya pemerintah daerah yang menargetkan Kabupaten Pandeglang untuk bisa swasembada pangan terutama untuk tanaman padi, jagung, dan kedelai dan menjadikan pandeglang sebagai lumbung pangan. Namun perlu untuk menjadikan perhatian bagi pemerintah daerah bahwa pertumbuhan ekonomi yang besar di sektor ini diperoleh dari kenaikan produksi yang cukup tinggi dan produksi yang tinggi ditengarai oleh penambahan luas panen.

3.2.4.2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan Usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah lapangan usaha memiliki kontribusi/share terbesar kedua terhadap PDRB Pandeglang. Pada tahun 2017 kontribusi lapangan usaha tersebut sebesar 11,40 persen, meningkat sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2016 sebesar 11,35 persen. Sementara itu, kinerjanya juga membaik karena pertumbuhannya mengalami percepatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 5,71 persen sedangkan pada tahun 2016 sebesar 4,97 persen. Pertumbuhan lapangan usaha tersebut ditopang oleh pertumbuhan perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor.

Berdasarkan hasil SE 2016 perdagangan di Pandeglang didominasi oleh perdagangan bukan mobil dan sepeda motor berskala mikro kecil. Dimana sebagian besar jika dilihat dari omsetnya kurang dari 300 juta rupiah selama setahun. Perlu diketahui bahwa aktivitas dari perdagangan di Pandeglang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk pandeglang.

3.2.4.3. Pertambangan dan Penggalian

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar ketiga terhadap pembentukan PDRB Pandeglang. Pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 10,44 persen, menurun sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 10,82 persen. Sementara itu dilihat dari kinerjanya yaitu pertumbuhannya selama tahun 2016 juga mengalami perlambatan yaitu sebesar 3,35 persen sedangkan pada tahun 2015 sebesar 4,27 persen. Pertambangan dan penggalian di pandeglang sendiri di topang oleh pertambangan bijih logam sebesar 52,57 persen dimana total produksi sebagian besar dikuasai oleh PT CSD anak perusahaan dari PT ANTAM, dan 46,00 persen adalah pertambangan minyak dan gas bumi tetapi masih dalam tahap eksplorasi oleh PT Minergi (perusahaan milik Negara Malaysia). Sementara itu penggalian lainnya hanya 1,43 persen itupun produksinya hanya digunakan untuk keperluan di Pandeglang saja.

3.3. Perbandingan antar wilayah

PDRB Kabupaten Pandeglang termasuk terendah di Provinsi Banten, dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Demikian juga PDRB per kapita termasuk kelompok rendah. Meskipun PDRB per kapita tersebut merupakan tolok ukur kasar kemampuan masyarakat Kabupaten Pandeglang dan wilayah lain di Provinsi Banten, nilai ini tetap akan jadi acuan penting untuk daerah, khususnya Kabupaten Pandeglang, untuk meningkatkan sinergi perekonomiannya agar sejajar dengan daerah lain

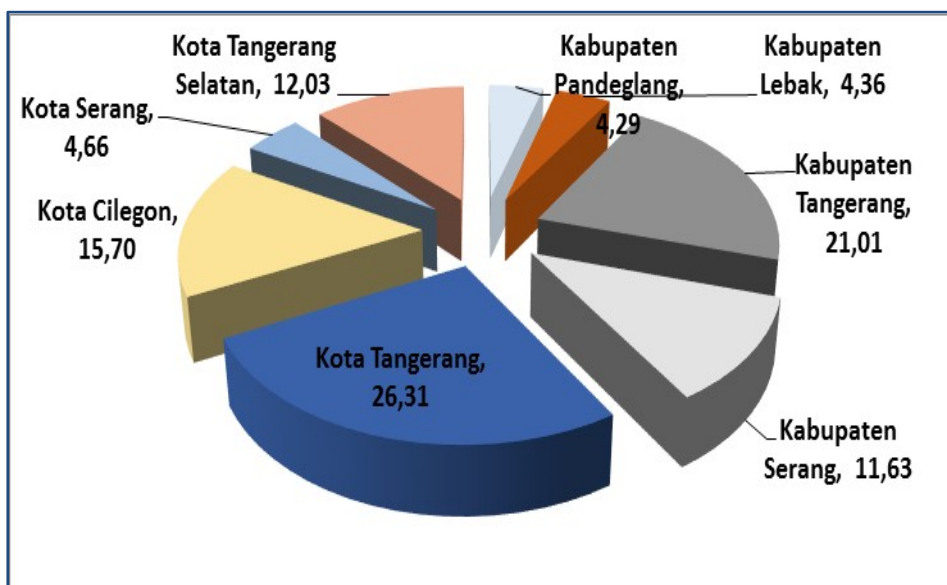
Tabel 4. Perbandingan Agregat PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten 2017

Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (miliar rupiah)	Distribusi Thdp Banten (persen)	LPE (persen)	Laju Implisit (persen)	Perkapita ADHB (juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Pandeglang	24.376,07	4,29	6,05	3,60	20,23
Kabupaten Lebak	24.750,68	4,36	6,05	3,19	19,21
Kabupaten Tangerang	119.293,28	21,01	5,84	3,08	33,28
Kabupaten Serang	66.048,96	11,63	5,21	3,09	44,22
Kota Tangerang	149.420,37	26,31	5,91	3,67	69,83
Kota Cilegon	89.142,32	15,70	5,59	2,89	209,70
Kota Serang	26.482,65	4,66	6,41	3,56	39,73
Kota Tangerang Selatan	68.317,15	12,03	7,43	3,63	41,53

Pada tahun 2017, PDRB Kabupaten Pandeglang secara nominal, kedudukannya diantara kabupaten/kota lainnya masih berada di posisi terendah, dibawah Kabupaten Lebak. Karena

PDRBnya terendah maka share terhadap PDRB Banten juga terendah. Sementara itu, pertumbuhannya masih di atas rata-rata pertumbuhan Banten. Untuk pendapatan per kapita, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 masih berada di urutan ketujuh, pendapatan per kapita tertinggi yaitu Kota Cilegon, hal tersebut wajar saja karena nilai tambah dari hasil aktivitas perekonomian Kota Cilegon tinggi sedangkan jumlah penduduknya paling sedikit diantara kabupaten/kota lainnya se-Provinsi Banten.

Grafik 5. Distribusi PDRB Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Banten, 2017 (persen)



Dari Grafik 5 tersebut, terlihat bahwa terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki peran kecil dalam pembentukan nilai tambah Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dan Kota Serang. Masing-masing memiliki peran

sebesar 4,29 persen, 4,36 persen dan 4,66 persen. Sangat kontras bila dibandingkan dengan kelima kabupaten/kota lainnya yang memiliki peran hingga dua digit. Namun demikian tidaklah berarti ketiga wilayah tersebut tidak memiliki peran penting dalam penciptaan nilai tambah di Banten. Kabupaten Pandeglang dan Lebak misalnya, kedua kabupaten tersebut merupakan daerah penyangga produk pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan perikanan.

3.4. Keuangan Pemerintah Daerah

Peranan pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian pada dasarnya terbagi menjadi tiga peran utama, yaitu pengatur, pengumpul dan penyedia (Teguh Dartanto, 2009). Sebagai pengatur, pemerintah bertugas menciptakan aturan main agar interaksi diantara pelaku ekonomi bersifat adil. Sebagai pengumpul, pemerintah bertugas mengumpulkan pendapatan dari pajak dan sumber pendapatan lain untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan sebagai penyedia, pemerintah bertugas menyediakan jasa layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur fisik dan pemerataan pendapatan melalui penciptaan lapangan pekerjaan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mempunyai dua sumber penganggaran, yaitu yang berasal dari **pendapatan asli daerah** (PAD) dan bantuan transfer dari Pemerintah Provinsi

Banten (bagi hasil pajak) maupun Pemerintah Pusat (DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan bagi hasil pajak dan SDA). Komponen pendapatan tersebut berikut alokasi penggunaannya disusun dalam sebuah sistem yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2003). APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (SKPD).

Tabel 5. Perkembangan dan Realisasi APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2017 (juta rupiah)

Uraian	2016			2017		
	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendapatan Asli Daerah	193.616,15	198.750,88	103	351.285,64	235.417,31	67
Dana Perimbangan	1.575.917,59	1.653.367,11	105	1.692.751,17	1.643.322,51	97
Lain-lain pendapatan yang sah	353.759,92	357.537,15	101	458.478,30	435.421,62	95
Total Pendapatan Daerah	2.123.293,67	2.209.655,13	104	2.502.515,11	2.314.161,44	92
Belanja Tidak Langsung	1.491.324,13	1.454.337,84	98	1.491.296,02	1.433.394,24	96
Belanja Langsung	920.303,40	761.022,70	83	1.270.290,54	954.489,72	75
Total Belanja Daerah	2.411.627,53	2.215.360,54	92	2.761.586,56	2.387.883,96	86
Surplus/(Defisit)	(288.333,86)	(5.705,41)		(259.071,45)	(73.722,53)	

Sumber : Dispenda Kab. Pandeglang

Pada tahun 2017, realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Pandeglang dilihat dari tingkat penyerapannya tidak sebgas pada tahun 2016, hanya 92 persen sedangkan pada tahun 2016 mencapai 104 persen. Realisasi pendapatan di topang oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, di sisi belanja mampu terealisasi hingga 86 persen yang ditopang oleh belanja tidak langsung.

3.4.1. Pendapatan Kabupaten Pandeglang

Hingga tahun 2017, sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Pandeglang masih mengandalkan pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten. Pendapatan transfer mencapai 85,45 persen pada tahun 2017 dan 86,30 persen pada tahun 2016 terhadap total pendapatan.

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2017 (juta rupiah)

Rincian	2016	Distribusi (%)	2017	Distribusi (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan	2.209.655,13	100,00	2.314.161,44	100,00
a. Pendapatan Asli Daerah	198.750,88	8,99	235.417,31	10,17
b. Pendapatan Transfer	1.906.981,35	86,30	1.977.470,05	85,45
- DAU + DAK	1.595.899,67	83,69	1.568.370,40	67,77
- Bagi Hasil Pajak dan SDA	57.467,43	3,01	74.952,11	3,24
- Transfer Pemprov	45.982,72	2,41	72.000,00	3,11
- Dana Penyesuaian (pusat)	207.631,52	10,89	262.147,55	11,33
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	103.922,91	4,70	101.274,08	4,38

Sumber: Dispenda Kab. Pandeglang

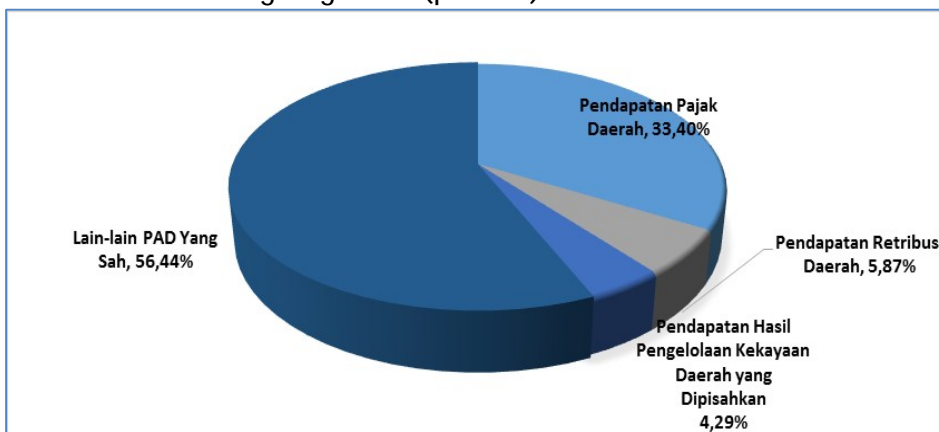
Transfer dari pemerintah pusat terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), bagi hasil pajak/bukan pajak, bagi hasil sumber daya alam dan dana penyesuaian. Sedangkan transfer dari pemerintah Provinsi Banten berupa dana bagi hasil pajak dan pendapatan hibah.

Terbatasnya sumber pajak dan retribusi daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang menyebabkan rendahnya peranan PAD dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang **Pajak dan Retribusi Daerah** pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut tujuh jenis pajak, yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam (galian golongan C), dan pajak parkir. Pemerintah Kabupaten Pandeglang atas persetujuan Kemendagri sebenarnya masih dapat menggali potensi pajak lainnya selama memenuhi beberapa kriteria, diantaranya pajak tersebut tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif dan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Pada tahun 2017, PAD Kabupaten Pandeglang tercatat sebesar 235,42 miliar rupiah, meningkat 18,45 persen dibanding **tahun 2016 yang hanya mencapai 198,75 miliar rupiah**. Namun total realisasi masih jauh dari yang telah ditargetkan yaitu sebesar 351,28 miliar rupiah. Adapun komponen terbesar yang menopang PAD adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kontribusinya sebesar 56,44 persen dan pendapatan dari pajak dengan kontribusi sebesar 33,40 persen. Sementara itu dari

pendapatan retribusi berkontribusi sebesar 5,87 persen, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,28 persen.

Grafik 6. Distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang 2017 (persen)



3.4.2. Belanja Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Sama halnya dengan target pendapatan yang mengalami kenaikan, target belanja pada tahun 2017 juga meningkat. Peningkatannya sebesar 14,51 persen dari tahun 2016. Namun untuk realisasinya tidak sebagus pada tahun sebelumnya 2016. Sampai akhir tahun 2017, realisasi belanja pemerintah hanya mencapai 86 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 92 persen. Penyebab rendahnya realisasi adalah menurunnya realisasi belanja pegawai baik di belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2017 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya di topang oleh realisasi belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai yang

mencapai 996,22 miliar rupiah. Selain belanja pegawai, komponen lain yang mendorong realisasi belanja tahun 2017 adalah belanja bantuan keuangan yang terealisasi sebesar 396,53 miliar rupiah. Sementara itu dari sisi belanja langsung, yang menjadi pendorong tingginya realisasi belanja **Pemerintah Kabupaten Pandeglang** adalah belanja modal sebesar 505,81 miliar rupiah dan belanja barang dan jasa sebesar 350,09 miliar rupiah.

Tabel 7. Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Pandeglang 2016-2017 (juta rupiah)

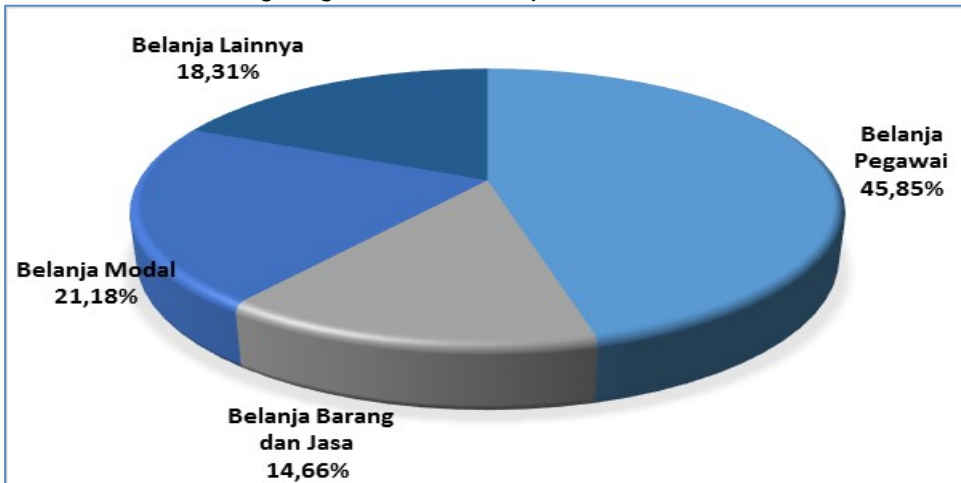
Uraian	2016			2017		
	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Pegawai	1.120.989,43	1.091.891,45	97	1.048.341,25	996.220,25	95
Belanja Hibah	21.669,84	20.012,23	92	27.969,48	26.372,23	94
Belanja Bantuan Sosial	4.781,34	1.400,00	29	11.383,00	8.590,00	75
Belanja Bagi Hasil	10.933,52	10.933,52	100	5.565,55	5.565,55	100
Belanja Bantuan Keuangan	330.449,99	330.100,63	100	396.536,74	396.536,74	100
Belanja Tidak Terduga	2.500,00	-	-	1.500,00	109,47	7
Belanja Tidak Langsung	1.491.324,13	1.454.337,84	98	1.491.296,02	1.433.394,24	96
Belanja Pegawai	92.800,50	87.418,45	94	129.740,79	98.574,61	76
Belanja Barang dan Jasa	345.509,57	304.299,32	88	496.505,41	350.098,45	71
Belanja Modal	481.993,33	369.304,93	77	644.044,33	505.816,66	79
Belanja Langsung	920.303,40	761.022,70	83	1.270.290,54	954.489,72	75
Total Belanja	2.411.627,53	2.215.360,54	92	2.761.586,56	2.387.883,96	86

Sumber: Dispenda Kabupaten Pandeglang

Secara keseluruhan total realisasi belanja dari sisi belanja langsung maupun tidak langsung, pos belanja terbesar pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah belanja pegawai yaitu sebesar 45,85 persen. Sementara itu proporsi belanja modal terealisasi terhadap total belanja sebesar 21,18 persen. Sedangkan belanja lainnya yang terdiri atas belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan

keuangan, belanja tak terduga dan dana desa mencapai 18,31 persen dari total belanja dan belanja barang dan jasa sebesar 14,66 persen.

Grafik 7. Distribusi Komponen Belanja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 (persen)



Pada komponen belanja modal, realisasi di tahun 2017 tercatat sebesar 505,81 miliar rupiah atau 76 persen dari total yang telah ditargetkan. Sementara itu proporsinya terhadap total belanja pemerintah hanya sebesar 21,18 persen. Mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 16,67 persen. Rendahnya proporsi belanja modal dalam APBD Kabupaten Pandeglang dapat berdampak pada lambatnya pergerakan sektor riil, mengingat konsumsi pemerintah merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Akibat yang dapat ditimbulkan diantaranya adalah dapat tidak terpenuhinya pencapaian target indikator-indikator ekonomi seperti yang tercantum dalam **rencana pembangunan jangka menengah** (RPJMD) Kabupaten Pandeglang.

3.5. Peran Intermediasi Perbankan

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran intermediasi dunia perbankan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi utama bank sesuai undang-undang tersebut. Melaksanakan fungsi intermediasi artinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito serta bentuk penghimpunan dana lainnya dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit.

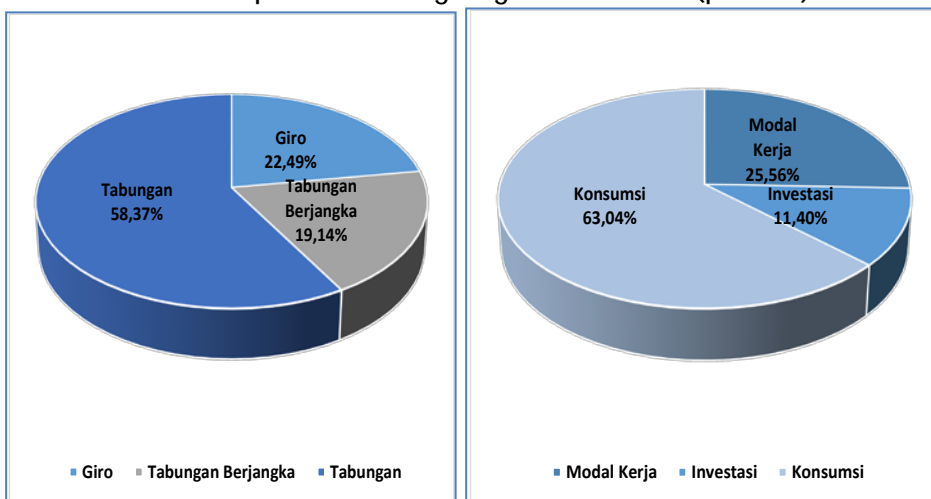
Tabel 8. Nilai Simpanan dan Pinjaman Masyarakat Kabupaten Pandeglang pada Bank Umum dan BPR Tahun 2015-2017 (juta rupiah)

Uraian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Simpanan (juta rupiah)	2.106.960,81	2.298.141,47	2.579.322,28
Giro	498.959,32	533.789,69	579.998,98
Tabungan Berjangka	381.855,74	445.110,99	493.705,74
Tabungan	1.226.145,75	1.319.240,79	1.505.617,56
2. Pinjaman (juta rupiah)	4.363.269,95	4.232.359,89	4.480.068,50
Modal Kerja	1.001.933,39	991.336,57	1.145.172,78
Investasi	1.204.779,11	835.086,18	510.574,87
Konsumsi	2.156.557,44	2.405.937,14	2.824.320,84
Loan to Deposit Ratio (%)	207,09	184,16	173,69
Surplus/Defisit (juta rupiah)	(2.898.145,09)	(2.256.309,14)	(1.900.746,22)

Sumber:www.bi.go.id

Posisi simpanan masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank umum dan BPR di wilayah Kabupaten Pandeglang pada akhir tahun 2017 sebesar 2,57 triliun rupiah naik 12,24 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2016, sedangkan posisi pinjaman/kredit yang disalurkan ke masyarakat mencapai 4,48 triliun rupiah naik 5,85 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2016. Masih sama dengan tahun sebelumnya 2016 dan 2015 jumlah porsi dana kredit yang disalurkan lebih besar dibandingkan dengan yang berhasil dihimpun, sehingga membuat Kabupaten Pandeglang tergolong sebagai daerah defisit dana perbankan, dimana untuk memenuhi kebutuhan kredit masyarakatnya dibutuhkan tambahan dana dari luar wilayah Kabupaten Pandeglang.

Grafik 8. Distribusi Komponen Simpanan Dan Kredit Yang Dihimpun Dan Disalurkan Bank Umum Dan BPR Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 (persen)



Pada akhir tahun 2017, sebagian besar dana simpanan masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan di Kabupaten Pandeglang berupa tabungan, yaitu meliputi 58,37 persen dari total dana simpanan, diikuti oleh giro dan deposito, masing-masing sebesar 22,49 persen dan 19,49 persen. Sedangkan penyaluran kredit/pinjaman tahun 2017 terbesar berupa pinjaman untuk konsumsi sebesar 2,82 triliun rupiah (63,04 persen), kemudian diikuti oleh modal kerja sebesar 1,14 triliun rupiah (25,56 persen) dan investasi sebesar 510,57 miliar rupiah (11,40 persen). Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8 dan Grafik 8.

Kedudukan Pandeglang sebagai daerah defisit dana perbankan tidak selalu berarti buruk. Indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam tiga tahun terakhir selalu di atas 100 persen. LDR yang diformulasikan sebagai perbandingan antara volume kredit yang diberikan dengan total dana yang dihimpun dari masyarakat sering dijadikan indikator pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan. Semakin tinggi LDR, maka semakin baik tingkat pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan. Pada akhir tahun 2016 LDR di Kabupaten Pandeglang sebesar 184,16 persen dan 173,69 persen pada tahun 2017. LDR tersebut mengindikasikan tetap tingginya intermediasi perbankan di Kabupaten Pandeglang dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Namun perlu perhatian juga karena selama tiga tahun terakhir ini nilainya semakin menurun.

Sementara itu perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pandeglang tidak terlepas

dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Tabel 9. Nilai Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah yang Disalurkan Pada Bank Umum dan BPR Tahun 2015-2017 (juta rupiah)

Uraian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Menurut Penggunaan	755.756,70	920.223,97	1.064.311,16
Modal Kerja	653.847,06	810.407,90	945.982,29
Investasi	101.909,64	109.816,08	118.328,87
Tidak Teridentifikasi	-	-	-

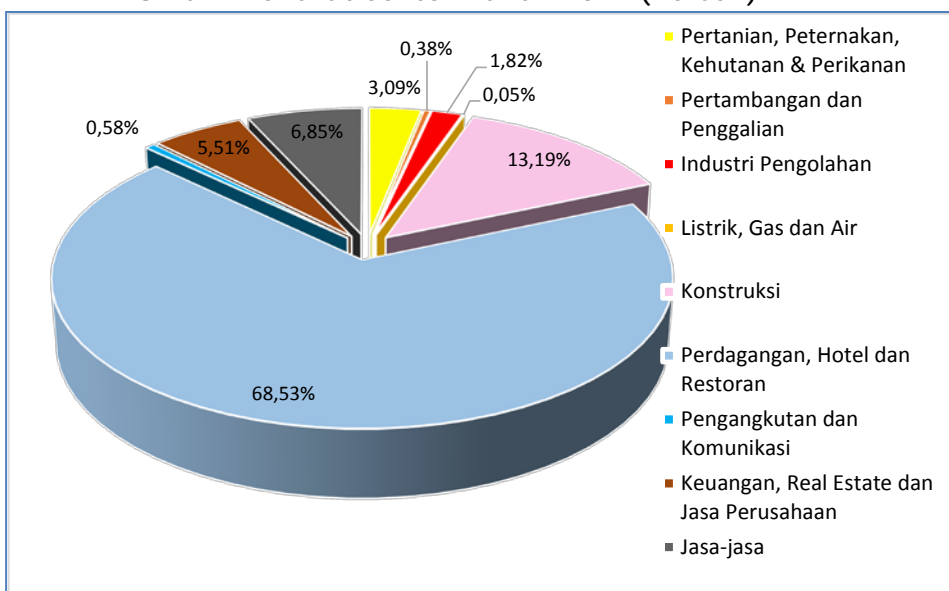
Sumber: www.bi.go.id

Sampai akhir 2016 data Statistik kredit UMKM Bank Indonesia didasarkan pada definisi plafon kredit, sehingga seluruh jenis penggunaan kredit (termasuk kredit konsumtif) masuk di dalam Statistik kredit UMKM selama plafon kreditnya antara Rp 0 - Rp 5 Miliar. Sejak Januari 2011 data Statistik kredit UMKM yang diterbitkan Bank Indonesia sudah mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008.

Posisi kredit UMKM (sesuai UU No. 20 Tahun 2008) yang disalurkan perbankan di Kabupaten Pandeglang pada 2017 adalah sebesar 1,06 triliun rupiah. Selama periode 2015-2017 jumlah kredit UMKM yang disalurkan mengalami perkembangan yang

baik, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 15,66 persen. Jika dilihat berdasarkan lapangan usahanya, penyaluran kredit UMKM terbesar adalah lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 68,53 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 13,19 persen, serta jasa-jasa sebesar 6,85 persen.

Grafik9. Distribusi Penyaluran Kredit UMKM Yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Tahun 2017 (Persen)



BAB IV
Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap beberapa indikator perekonomian yang disampaikan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten Pandeglang tahun 2017 tercatat sebesar 24.376,07 miliar rupiah, sedangkan tahun 2016 sebesar 22.186,72 miliar rupiah.
- b. Sebagai *proxy* dari pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto perkapita Kabupaten Pandeglang tahun 2017 tercatat sebesar 20,22 juta rupiah setahun.
- c. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang tahun 2017 sebesar 6,05 persen, tumbuh lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 5,02 persen.
- d. Struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang tahun 2017 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan 34,36 persen. Berikutnya Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peran sebesar 11,40 persen dan Pertambangan dan Penggalian dengan peran 9,45 persen. Peran yang dimaksud adalah

peran terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang tahun 2017.

- e. Struktur perekonomian di **pandeglang** untuk tahun 2017 didominasi oleh sektor tersier yaitu sebesar 44,56 persen.
- f. Sumber pendapatan **Pemerintah** Kabupaten Pandeglang tahun 2017 masih mengandalkan pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Banten. Dana transfer tersebut mencapai 85,45 persen (1,97 triliun rupiah) dari total pendapatan **Pemerintah** Kabupaten Pandeglang. Sementara itu disisi belanja dari anggaran yang telah ditetapkan mampu terealisasi sebesar 86 persen, dimana pos belanja terbesar adalah belanja pegawai yang mencapai 45,85 persen (1.094,79 miliar rupiah).
- g. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) diformulasikan sebagai besaran kredit tersalurkan dibagi dengan simpanan yang terhimpun dalam satu wilayah dan periode waktu tertentu. Pada tahun 2017, LDR Kabupaten Pandeglang menurun sebesar 5,09 persen terhadap tahun 2016. Nilai pada tahun 2017 sebesar 173,69 persen sedangkan tahun 2016 mencapai 184,16 persen. Dengan nilai simpanan tahun 2017 mencapai 2,57 triliun rupiah meningkat 12,24 persen dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 2,29 triliun rupiah. Seperti halnya simpanan, kredit yang tersalurkan juga mengalami peningkatan sebesar 5,85 persen. Pada tahun

2017 mencapai 4,48 triliun rupiah sedangkan tahun 2016 hanya 4,23 triliun rupiah.

4.2. Rekomendasi

Otonomi daerah telah bergulir sejak tahun 2000 dengan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan kedua undang-undang yang berlaku hingga saat ini maka pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri dengan maksud untuk lebih mendekatkan/meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Kabupaten Pandeglang, sebagai salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Banten memiliki potensi perekonomian yang cukup besar, khususnya dibidang pertanian, industri berbasis hasil pertanian, dan pariwisata. Sehingga tidak bisa disangkal jika tenaga kerja terserap disektor terkait cukup besar. Luas lahan basah (sawah) di Kabupaten Pandeglang mencapai hampir 20 persen dari luas wilayah Kabupaten Pandeglang dan garis pantai yang panjang, merupakan salah satu bukti besarnya potensi ekonomi disektor pertanian (pertanian tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasilnya, kehutanan, dan perikanan). Hal ini dibuktikan juga dengan tingginya distribusi

pertanian terhadap pembentukan nilai tambah bruto Kabupaten Pandeglang yang mencapai 34,36 persen. Selain itu telah dikenalinya daerah pengumpulan ikan dan hasil laut lainnya di wilayah pantai Kabupaten Pandeglang yang **me-supply** banyak wilayah, khususnya Banten dan Jakarta.

Besarnya potensi pertanian di Kabupaten Pandeglang hendaknya ditanggapi dengan program atau kebijakan yang mendukung penguatan sektor pertanian sebagai sektor andalan. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan kepada petani dan buruh tani sehingga hasil pertanian dapat meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Memperkuat jaringan distribusi penyaluran hasil pertanian dan insentif bagi pelaku pertanian dan sektor lain yang memanfaatkan hasil pertanian lokal secara langsung sehingga nilai tambah terbentuk dari sektor pertanian dan hasil olahannya akan meningkat. Secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Pandeglang. Salah satunya dengan memperbanyak industri yang berbasis pertanian.

Permasalahan pembiayaan juga harus didorong untuk memajukan sektor pertanian dan sektor hilir yang memanfaatkan hasil pertanian. Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah hendaknya mendapat porsi kredit cukup besar bagi pengusaha pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Tidak cukup dengan mendapatkan porsi yang besar, kemudahan dalam proses serta penyertaan penjaminan yang mudah dipenuhi, harus diperhatikan. Peran lembaga keuangan sangat baik adalah

koperasi yang dikelola langsung oleh petani dan atau pengusaha hasil pertanian. Dengan menempatkan azas kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi. Disamping itu juga sangat penting membekali petani mengenai informasi perbankan.

Perubahan pola pikir atau *mindset* petani juga diperlukan. Masyarakat petani yang masih cenderung selalu mengharapkan bantuan dalam budidaya pertanian. Berdasarkan pola perkembangan pertanian di pandeglang selama ada bantuan dari pemerintah baik bibit, pupuk atau yang lainnya produksi yang dihasilkan meningkat tinggi, namun apabila bantuan berkurang atau tidak ada maka dapat dipastikan tingkat produksinya tidak sebaik pada waktu ada bantuan.

Oleh karenanya, beban sektor andalan Kabupaten Pandeglang bukan hanya menjadi beban satu bagian atau dinas, melainkan sinergi seluruh kekuatan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat. Harapan besar ditekankan pada sektor ini, dengan majunya sektor pertanian maka sektor ini akan menarik untuk dikerjakan. Pada akhirnya diharapkan untuk dapat mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan perpindahan penduduk dari desa ke kota (*rural urban migration*).

Kabupaten Pandeglang dikenal juga sebagai daerah dengan kawasan wisata yang banyak, baik wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata lainnya (<http://pandeglangkab.go.id>). Langkah yang sangat tepat telah diambil oleh pemerintah Pandeglang. Dengan menempatkan informasi unggulan daerah

dalam situs resmi pemerintah sehingga masyarakat (seluruh dunia) dapat mengetahui lokasi, biaya, dan informasi lainnya dengan mudah. Secara makro dukungan terhadap pariwisata sudah ada, baik sarana jalan maupun kemudahan informasi. Hanya perlu menjaga konsistensi dan peningkatannya. Dalam artian, sarana yang telah ada perlu terus dijaga keberadaannya dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat dirasakan kemudahan mencapai lokasi wisata dan wisatawan mendapatkan tujuan dari wisatanya.

Sebagai penutup, pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk mengelola daerahnya, termasuk Kabupaten Pandeglang. Namun keterbatasan kemampuan keuangan yang dapat diperoleh dari daerah sendiri menjadi kendala berkembangnya Kabupaten Pandeglang. Untuk membantu pemerintah dalam mengatasi hal itu perlu sikap profesional aparatur sehingga mampu berbuat dan bersikap efektif dan efisien dalam setiap tindakan, khususnya dalam pengelolaan pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, dapat diharapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kawajaran dan kesetaraan dari setiap tindakan pemerintah dapat terwujud (*clean government*).

Lampiran

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2017

KATEGORI	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.902,99	7.537,96	8.376,59
B. Pertambangan dan Penggalian	2.188,52	2.300,56	2.302,41
C. Industri Pengolahan	1.199,21	1.278,02	1.412,38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	115,03	133,27	148,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,45	12,32	13,48
F. Konstruksi	995,03	1.102,77	1.260,88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.295,16	2.517,96	2.778,46
H. Transportasi dan Pergudangan	1.175,45	1.268,95	1.395,09
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.068,15	1.173,40	1.302,87
J. Informasi dan Komunikasi	62,75	65,65	74,64
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	490,45	568,04	626,91
L. Real Estate	1.432,63	1.561,00	1.743,95
M,N. Jasa Perusahaan	45,71	49,84	54,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.270,49	1.404,99	1.519,23
P. Jasa Pendidikan	686,23	763,94	866,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193,28	210,66	233,82
R,S,T,U. Jasa lainnya	214,98	237,40	265,87
PDRB	20.347,50	22.186,72	24.376,07
PDRB Non Migas	19.270,12	21.122,92	23.293,18

*Angka Perbaikan

**Angka Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2017

KATEGORI	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.538,55	4.794,16	5.172,69
B. Pertambangan dan Penggalian	1.497,69	1.547,64	1.508,41
C. Industri Pengolahan	1.049,69	1.070,25	1.153,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	106,25	128,28	129,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,88	11,45	12,14
F. Konstruksi	828,80	878,49	964,23
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.034,20	2.135,36	2.257,36
H. Transportasi dan Pergudangan	954,30	1.009,42	1.070,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	844,30	905,33	985,37
J. Informasi dan Komunikasi	70,76	73,58	80,11
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	402,94	450,65	473,42
L. Real Estate	1.331,56	1.409,45	1.493,17
M,N. Jasa Perusahaan	37,86	39,63	41,95
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	893,44	947,84	978,45
P. Jasa Pendidikan	519,78	558,75	601,39
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	159,48	169,84	181,48
R,S,T,U. Jasa lainnya	165,00	178,00	192,11
PDRB	15.974,13	16.856,47	17.876,03
PDRB Non Migas	15.366,73	16.248,94	17.275,71

*Angka Perbaikan

**Angka Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2015-2017

KATEGORI	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,93	33,98	34,36
B. Pertambangan dan Penggalian	10,76	10,37	9,45
C. Industri Pengolahan	5,89	5,76	5,79
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,60	0,61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	4,89	4,97	5,17
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,28	11,35	11,40
H. Transportasi dan Pergudangan	5,78	5,72	5,72
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,25	5,29	5,34
J. Informasi dan Komunikasi	0,31	0,30	0,31
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,41	2,56	2,57
L. Real Estate	7,04	7,04	7,15
M,N. Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,24	6,33	6,23
P. Jasa Pendidikan	3,37	3,44	3,55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,95	0,96
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,06	1,07	1,09
PDRB	100,00	100,00	100,00
PDRB Non Migas	94,71	95,21	95,56

*Angka Perbaikan

**Angka Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Kabupaten Pandeglang (persen) Tahun 2015-2017

KATEGORI	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,72	5,43	7,69
B. Pertambangan dan Penggalian	3,41	3,34	(2,53)
C. Industri Pengolahan	4,48	1,96	7,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,75	20,73	1,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,29	5,22	5,97
F. Konstruksi	6,24	6,00	9,76
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,84	4,97	5,71
H. Transportasi dan Pergudangan	3,28	5,78	6,03
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,20	7,23	8,84
J. Informasi dan Komunikasi	3,92	3,99	8,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,78	11,84	5,05
L. Real Estate	5,64	5,85	5,94
M,N. Jasa Perusahaan	6,43	4,67	5,87
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,18	6,09	3,23
P. Jasa Pendidikan	6,65	7,50	7,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,28	6,50	6,85
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,82	7,88	7,93
PDRB	5,81	5,52	6,05
PDRB Non Migas	5,98	5,74	6,32

*Angka Perbaikan

**Angka Sementara